

Nomor : B/488/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2021

7 Maret 2022

Yth. **Bupati Bantul**
di
Bantul

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai **81,21** atau predikat **A**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,05	26,13
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,81	21,07
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,19	12,28
d.	Evaluasi Internal	10	8,06	8,16
e.	Capaian Kinerja	20	13,81	13,57
	Nilai Hasil Evaluasi		80,92	81,21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian belum terlihat kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi Sistem AKIP pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun upaya dimaksud belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi, sehingga belum terlihat peningkatan nilai hasil evaluasi dibandingkan dengan tahun lalu;
 - b. Laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah masih dijumpai yang belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, antara lain analisis terhadap capaian kinerja maupun perbandingan data kinerja belum disajikan secara memadai, sehingga belum tersedia informasi kinerja secara utuh penyebab tidak tercapai suatu sasaran;
 - c. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 hampir seluruhnya dapat tercapai, bahkan ada capaian kinerja yang capainnya melampaui 100%. Hal tersebut disebabkan antara lain adanya revisi target kinerja 2020
 - d. Secara umum capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Bantul cukup baik. Namun demikian, untuk indikator makro "Tingkat Kemiskinan" Kabupaten Bantul Tahun 2020 realisasinya termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Provinsi DIY.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sedemikian rupa sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi tersebut;
2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh Perangkat Daerah sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik. Selanjutnya, memanfaatkan informasi kinerja tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, seperti penilaian kinerja dan perbaikan perencanaan;
3. Mengupayakan langkah – langkah strategis untuk menurunkan "Tingkat Kemiskinan" sehingga tidak lagi melampaui rata rata kabupaten kota di Provinsi DIY;

4. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan budaya kinerja berkelanjutan yang telah dibangun selama ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.